

Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata: Studi Deskriptif Kualitatif pada Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas

Herlan Suherlan¹, Yanthi Adriani², Bunga Cinta Evangelin³, Choirunnisa Rahmatika⁴, Daniel Alfaris Surya Pah⁵, Inas Jihan Fauziyyah⁶, Livia Auryn Wibowo⁷, Mokhamad Juang Sultan Hanafi⁸
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung^{1,2,3,4,5,6,7,8}
hel@stp-bandung.ac.id

Abstract

The lack of Pokdarwis' roles results in the lack of community empowerment and the benefits that are thoroughly gained in managing the village into a tourist village. The purpose of this research is to identify tourist products in tourist villages as well as the extent of community involvement in supporting tourism activities. The research method used is descriptive qualitative with a focus on the community involvement to support tourism village program. The analyses used to process the findings' data are Tourism Area Life Cycle (TALC) analysis and stakeholder mapping. From the analysis results, information concerning tourist products and how far the community was involved to manage resources was obtained. Regarding the position of the community and Pokdarwis as stakeholders, it was in the position of subjects, which had high interests but low influence. This research provides implications to increase community involvement in tourism activities.

Keywords: *community participation; tourism stakeholders; village tourism*

Abstrak

Kurang aktifnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi suatu permasalahan yang terjadi pada beberapa desa wisata. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurang maksimalnya manfaat yang didapatkan dalam mengelola desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk wisata di desa wisata serta sejauh mana keterlibatan masyarakatnya dalam mendukung kegiatan pariwisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam mendukung program desa wisata. Analisis yang digunakan untuk mengolah data hasil temuan adalah analisis *Tourism Area Life Cycle* (TALC) dan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penelitian ini menunjukkan informasi seputar produk wisata serta keterlibatan masyarakat dalam mengolah produk yang sudah dimiliki, agar dapat mendukung jalannya desa wisata. Didapati juga kedudukan masyarakat dan Pokdarwis sebagai pemangku kepentingan berada pada posisi *subjects* yang mana memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Penelitian ini memberikan implikasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.

Kata Kunci: keterlibatan masyarakat; pemangku kepentingan pariwisata; desa wisata

A. PENDAHULUAN

Desa wisata menjadi salah satu agenda pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan desa secara terpadu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah dalam RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan berdirinya 244 desa wisata dan mendorong 205 desa wisata yang sudah ada agar menjadi desa wisata maju. Upaya ini dilakukan karena dirasa efektif demi kemajuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta pemerataan pembangunan wilayah sehingga dapat menekan tingkat urbanisasi. Pada hakikatnya, desa wisata harus memiliki daya tarik atau keunikan dan melibatkan warga lokal dalam pengelolaannya melalui program pemberdayaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

merupakan sebuah model pengembangan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata (Dewi, dkk. 2013). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini merupakan sebuah kegiatan pengembangan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dan dibantu oleh beberapa pihak terkait seperti pemerintah, swasta dan akademisi untuk menuju tujuan pengembangan tersebut. Pengelolaan dan ide kegiatan pengembangan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat akibat dari kegiatan pariwisata tersebut. Mengacu *United Nations Sustainable Development Goals* (UN SDGs) yang dikeluarkan pada September 2015, adanya desa wisata dengan konsep pemberdayaan masyarakat membantu merealisasikan dan mencapai tiga poin tujuan atau goals diantaranya menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan (Dewi, dkk. 2013). Oleh karena itu, masyarakat lokal berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata yang merupakan sumber daya dan unsur penggerak utama dalam kegiatan pariwisata di desa tersebut. Konsep desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat dan untuk mencapai tujuan *United Nations Sustainable Development Goals* ini berkesinambungan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 Pasal 2 Nomor 8 yaitu arah pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan serta pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Namun, pada beberapa desa wisata dihadapkan oleh beberapa masalah, seperti pemerintah desa yang cukup dominan dalam menjalankan program desa wisata serta kurang aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah dibentuk. Kurang aktifnya Pokdarwis bertentangan dengan maksud dari pembentukan Pokdarwis itu sendiri yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dan manfaat yang didapatkan secara menyeluruh dalam mengelola desa tersebut menjadi desa wisata kepada masyarakat. Selain itu, daya tarik wisata terutama pada aspek budaya pada beberapa desa wisata masih kurang bervariasi. Seperti tercantum dalam Sidiq dan Resnawaty (2017), menyatakan bahwa dominasi pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata menjadikan masyarakat tidak memiliki kesempatan maupun kemauan untuk berpartisipasi dalam mendukung program desa wisata.

Seperti penelitian yang telah dilakukan di Desa Wisata Catur, Kintamani, Bali, bahwa desa tersebut kini berada di tahap *involvement*. Masyarakat lokal Desa Wisata Catur mulai aktif terlibat dalam mengembangkan kegiatan pariwisata mulai dari pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dan mengemas potensi wisata menjadi paket wisata. Walaupun masyarakat sudah mulai aktif dalam pelaksanaan desa wisata, tetapi sebagian besar masyarakat dapat dikatakan belum terlibat secara optimal karena keterbatasan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki masyarakat lokal. Pemerintah Desa Wisata Catur juga diharapkan meningkatkan

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pariwisata agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam pengembangan pariwisata (Saputra, 2020). Selain itu, dalam Palimbunga (2018), pemerintah perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan balik dalam jalannya program desa wisata. Hal tersebut diperlukan supaya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah tidak hanya satu arah, sehingga keterlibatan masyarakat dapat terus meningkat, sejalan dengan berkembangnya pariwisata.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan Pokdarwis dan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung program desa wisata. Sehingga, artikel ini dapat dijadikan acuan penelitian lanjutan di kemudian hari. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada *stakeholder*, yang sedang maupun akan terlibat pada pembangunan, agar mengetahui gambaran keadaan desa wisata dan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

B. STUDI LITERATUR

Desa Wisata

Muliawan (2008) menjelaskan bahwa desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam perdesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Agar desa wisata dapat terus berjalan dan berkelanjutan, terdapat tiga konsep utama dalam komponen desa wisata (Nurhayati, 1993), yaitu akomodasi dari tempat tinggal penduduk setempat, atraksi berupa keseharian masyarakat serta setting fisik, dan desa bersifat unik serta langka.

Pemberdayaan Masyarakat

Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013:215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Menurut Sinclair (1998) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memajukan masyarakatnya sendiri dan menjadi mandiri dalam mengelola sumber daya serta mendapatkan manfaat yang positif dari kegiatan pariwisata tersebut.

Menurut Hamzah (2009), dalam menjalankan pariwisata berbasis masyarakat dibutuhkan perencanaan yang matang agar dapat dengan mudah diimplementasikan sehingga menghasilkan dampak positif, baik bagi masyarakat lokal maupun sumber daya yang dimiliki. Adapun peran-

peran dari pariwisata itu sendiri yang harus diperhatikan dan disampaikan kepada komunitas lokal, yaitu:

1. Pariwisata sebagai sumber hidup dan pendapatan alternatif serta menguntungkan, terlebih bagi daerah yang sumber ekonomi utamanya sedang terancam, sehingga dengan adanya pariwisata diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.
2. Pariwisata sebagai salah satu alat yang digunakan dalam upaya konservasi, baik alam maupun budaya, sehingga potensi tersebut dapat sustain.
3. Pariwisata sebagai “*training ground*” untuk partisipasi mendatang pada sektor ekonomi lain. Komunitas yang berhasil dalam mengembangkan proyek pariwisata dapat menjadi contoh model bagi pengembangan destinasi lain dan berdampak pada datangnya atensi dari berbagai pihak seperti dari pemerintah dan perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

Tourism Area Life Cycle (TALC)

Tourism Area Life Cycle (TALC) adalah sebuah konsep dalam ilmu kepariwisataan yang ditemukan oleh Butler (1980), konsep ini menunjukkan perkembangan yang akan dilalui sebuah destinasi dari saat ditemukan sampai ke titik penurunan ataupun peremajaan melalui grafik sederhana. Ada enam tahapan yang akan dilewati oleh sebuah destinasi, yaitu *exploration*, *involvement*, *development*, *consolidation*, *stagnation*, dan *decline* atau *rejuvenation* dengan ciri-ciri dari tahapan tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 1
Tahapan TALC

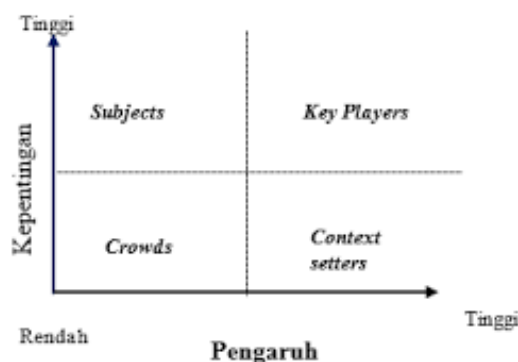
No.	Tahapan	Ciri-ciri
1.	Eksplorasi (<i>Exploration</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi baru ditemukan. 2. Jumlah wisatawan masih sedikit. 3. Masih alami dan belum ada fasilitas pariwisata
2.	Keterlibatan (<i>Involvement</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai disediakan fasilitas pariwisata bagi pengunjung. 2. Masyarakat lokal mulai terlibat dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. 3. Mulai adanya promosi destinasi berskala kecil dan penentuan target pasar.
3.	Pembangunan (<i>Development</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat. 2. Adanya peningkatan kunjungan wisatawan. 3. Fasilitas mulai disesuaikan standard internasional. 4. Atraksi tambahan mulai dibentuk guna mendukung daya tarik utama. 5. Mulai masuknya investor dari luar.
4.	Konsolidasi (<i>Consolidation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kenaikan jumlah wisatawan akan mulai menurun. 2. Pariwisata memiliki pengaruh cukup besar pada perekonomian. 3. Perluasan pemasaran dan promosi.

5. Stagnasi (<i>Stagnation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puncak jumlah wisatawan telah tercapai. 2. Kapasitas berbagai faktor sudah terlampaui di atas daya dukung sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3. Atraksi lokal akan tergantikan oleh fasilitas buatan. 4. Citra atau <i>image</i> yang terbentuk sudah tidak menarik bagi wisatawan.
6. Penurunan (<i>Decline</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi tidak dapat bersaing dengan destinasi baru. 2. Kunjungan wisatawan menurun. 3. Fasilitas wisata akan berkurang atau dialihkan sebagai fasilitas non pariwisata. 4. Partisipasi lokal kembali meningkat karena lemahnya pasar.
7. Peremajaan (<i>Rejuvenation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan dan peremajaan destinasi. 2. Adanya inovasi produk berdasar sumber daya yang belum dimanfaatkan.

Sumber: Butler, 2006

Pemetaan *Stakeholder* Desa Wisata

Menurut Johnson dan Scholes (2002), perangkat ini digunakan untuk menilai kepentingan setiap *stakeholder* yang terlibat. Sedangkan berdasar Jonathan Morris (2012), *stakeholder mapping* merupakan proses kolaboratif yang mencakup penelitian, debat, dan diskusi dengan tujuan menarik kesimpulan dari berbagai pandangan untuk menentukan daftar utama *stakeholder* secara menyeluruh. Pada proses identifikasi dan menentukan peran *stakeholder*, peneliti mengacu pada konsep yang diusung oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, yaitu konsep model pentahelix yang dikhususkan untuk pengelolaan desa dan kawasan perdesaan. Menurut Lindmark, Stureson, dan Roos (2009) dalam Muhyi, dkk. (2017), pentahelix merupakan strategi pariwisata yang melibatkan unsur-unsur masyarakat serta lembaga non-profit untuk mewujudkan suatu inovasi didukung dengan sumber daya dan potensi wisata yang ada. Strategi Pentahelix pada pariwisata di Indonesia dikenal dengan strategi ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, dan Media*). Dari masing-masing *stakeholder* kemudian dilakukan pemetaan berdasarkan pengaruh dan kepentingan dari tiap *stakeholder* dengan menggunakan matriks seperti di bawah ini.



Gambar 1. Matriks *Stakeholder*

Sumber: Reed et al., 2009

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat fleksibel, luwes, dan terbuka, serta lebih memfokuskan pada penggambaran fenomena sosial yang terjadi pada lingkup penelitian, dan dalam pelaksanaannya, data serta teori digali sedalam-dalamnya agar hasil temuan mampu dideskripsikan secara utuh (Bungin, 2015). Dalam hal tersebut, peneliti menggali informasi terkait produk wisata 3A, posisi desa, pemangku kepentingan terlibat, juga sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung jalannya desa wisata.

Kegiatan penelitian dilakukan di Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan objek penelitian yaitu masyarakat desa. Kemudian, untuk teknik pengambilan sampel atau informan, peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan orang yang dianggap paling mengerti terkait topik penelitian, yaitu Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa Melung, BUMDes Melung, Pokdarwis Melung, serta masyarakat lokal yang terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata. Pemilihan informan dirasa dapat memberikan gambaran pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat secara jelas.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi partisipasi terbuka (*overt participant observation*) langsung di lapangan, serta melalui *peer debriefing* dan wawancara atau *interview* dengan informan. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan melalui data pustaka terkait profil wilayah dan partisipasi masyarakat di Desa Wisata Melung.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data temuan yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992). Pada penelitian ini juga peneliti melakukan analisis *Tourism Area Life Cycle* (TALC) untuk mengetahui posisi desa wisata saat ini serta melakukan pemetaan pemangku kepentingan atau *stakeholder* guna mengetahui sejauh mana peran dari masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mendukung Desa Melung sebagai desa wisata.

D. HASIL DAN ANALISIS

Produk Wisata Desa Wisata Melung

Desa Wisata Melung merupakan sebuah desa yang secara administratif berada di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa ini terletak di lereng Gunung Slamet dengan perbatasan Hutan PERHUTANI dan Desa Sirampok, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes di sebelah utara; Desa Windujaya di sebelah barat; Desa Ketenger dan Desa Karangtengah di sebelah timur; serta Desa Kutaliman dan Desa Kalikesur di sebelah selatan. Desa Melung ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan SK Bupati Banyumas Nomor 556/167/2020 dengan skor nilai sebesar 62 dengan klasifikasi desa wisata berkembang. Berdasarkan hasil temuan, terdapat sejumlah produk wisata baik yang sudah berjalan maupun sedang dikembangkan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2
 Produk Wisata Desa Wisata Melung

Produk Wisata	Jenis	Keterangan
Atraksi	Alam	Bukit Agaran yang saat ini sedang ditutup dan rencana akan dibuka kembali serta dikelola oleh Pemerintah Desa
		Bukit Cendana sebagai tempat pengamatan Burung Elang Jawa
	Budaya	Gamelan dan tari tradisional Lengger Banyumasan yang saat ini sedang dikembangkan dan dilatih oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya
		Kopi Lung dan <i>Lung Coffee</i> , usaha kopi milik pribadi yang menjadi ciri khas Desa Melung, serta Kopi Meletup yang menjadi salah satu agenda Pokdarwis. Penjualan jenis-jenis kopi tersebut sudah sampai ke berbagai kota.
Buatan	Pagubugan Melung, kolam renang di tengah sawah, dan gubug-gubug tempat bersantai dan beristirahat. Berada di bawah pengelolaan Bumdes.	
	Green House Igir Mbawang, tempat penanaman sayuran organik yang nantinya akan dijadikan sebagai wisata edukasi.	
Amenitas	Akomodasi	Untuk akomodasi di Desa Melung hanya ada penginapan seperti <i>homestay</i> yang sudah ada dan disediakan oleh masyarakat, sampai saat ini terhitung sudah 10 rumah yang telah dijadikan <i>homestay</i> dan memiliki standar serta izin usaha.
	Tempat makan dan minum	Terdapat warung-warung kecil yang menjual makanan dan minuman, baik makanan berat maupun ringan dengan harga standar.
	Keamanan	Tingkat kriminalitas rendah, setiap malam ada petugas ronda dari masyarakat yang berjaga, hanya saja jalan yang terlalu sempit membuat pengendara, khususnya roda empat harus berhati-hati karena masih belum ada pembatas jalan.
	Sanitasi/CHSE	Destinasi wisata di Desa Melung sudah menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sudah disediakan keran untuk cuci tangan di depan pintu masuk daya tarik wisata. Pemerintah desa pun telah mengadakan pelatihan dan pembekalan kepada Linmas terkait penanganan COVID-19. Pengunjung juga dapat memesan tiket melalui <i>website</i> resmi desa dan membayar tiket menggunakan QRIS.
Aksesibilitas	Infrastruktur	Jarak tempuh dari Purwokerto sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas menuju Desa Melung sekitar 18 km dengan waktu tempuh selama 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi jalan menuju desa masuk ke

	dalam kategori baik dan mudah dilalui. Untuk jalan di Desa Melung sudah teraspal dengan baik, tetapi dengan lebar jalan yang cukup sempit yaitu 3 - 3,5 meter sehingga tidak bisa dilalui oleh dua kendaraan roda empat secara bersamaan, dan untuk penerangan seperti lampu jalan masih kurang.
Transportasi	Belum adanya transportasi umum yang menuju ke Desa Melung. Untuk menuju desa ini dapat menggunakan kendaraan seperti motor/mobil pribadi. Selain itu terdapat fasilitas rental motor kepada wisatawan yang menginap di <i>homestay</i> guna memudahkan wisatawan selama berada di Desa Melung.
Informasi	Informasi terkait Desa Melung dapat ditemui melalui laman resmi yang dikelola oleh pemerintah desa melalui link www.melung.desa.id

Sumber: Olahan Data Primer oleh Tim Peneliti, 2021

Dari tabel di atas, Desa Melung memiliki produk wisata yang dapat mendukung desa menjadi sebuah desa wisata meskipun perlu pembenahan lagi khususnya pada sisi keamanan guna menjamin wisatawan tetap aman selama berada di Desa Melung.

Keterlibatan Masyarakat dalam Menjalankan Desa Wisata

Pengelolaan Desa Wisata Melung bersifat *top down* dan dipegang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa Melung sehingga karena hal tersebut lah pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal. Oleh sebabnya, pada tahun 2018 dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) guna membantu BUMDes dalam mengurus unit usaha pariwisata sebagai penggali dan pemberi motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata Desa Melung meskipun Pokdarwis sempat terhenti karena kurangnya SDM yang mumpuni dan akhirnya mulai dilakukan pembenahan di tahun 2020.

Keterlibatan masyarakat dibagi menjadi tiga, sesuai produk wisata teridentifikasi, yaitu dari sisi atraksi, amenities, dan aksesibilitas. Keterlibatan terkait atraksi dapat dilihat pada partisipasi masyarakat dalam membuat produk khas Melung, seperti Kopilung, Kopi Meletup, dan anyaman bambu yang dapat dijadikan sebagai wisata edukasi sekaligus suvenir bagi wisatawan yang berkunjung. Kemudian guna menambah potensi pariwisata yang ada, pemerintah desa memberikan fasilitas bagi warga lokal untuk berlatih gamelan dan tari tradisional, yang mana warga tersebut secara sukarela hadir untuk berlatih. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Melung setiap hari Senin dan Jum'at malam. Kegiatan gamelan dan tari tradisional rencananya akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba-lomba budaya mewakili desa serta sebagai daya tarik wisata yang dapat ditawarkan pada wisatawan ke depannya, baik dijadikan penyambutan maupun pelatihan bagi wisatawan sebagai bagian dari rangkaian paket wisata.

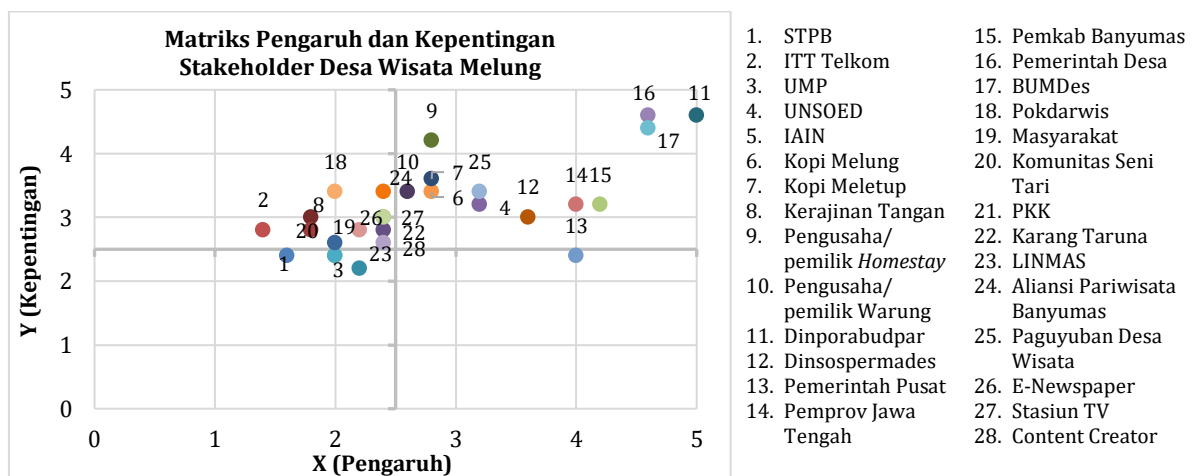
Pada aspek amenities, beberapa warga mengajukan diri sebagai pelaku usaha *homestay* setelah mengikuti penyuluhan terkait desa wisata dan akomodasi. Sudah ada sepuluh *homestay* yang terdaftar dan memiliki izin resmi dari pemerintah dan siap digunakan sebagai akomodasi untuk wisatawan. Namun dikatakan oleh Ibu Lastris sebagai salah satu pemilik *homestay*, belum ada harga pasti per malam dikarenakan belum adanya paket wisata yang dikeluarkan sehingga untuk harga ditentukan oleh wisatawan sendiri dan keseluruhan biaya langsung masuk ke pemilik *homestay* sebab belum ada sistem bagi hasil dengan desa maupun BUMDes. Selain itu,

pemberdayaan masyarakat juga terlihat dalam langkah yang diambil menanggapi munculnya pandemi COVID-19 melalui pembenahan dan pelatihan Linmas sebagai badan yang bertanggung jawab. Linmas sendiri beranggotakan warga lokal yang secara sukarela bergabung dan kemudian diberikan arahan terkait protokol kesehatan yang nantinya dapat diterapkan di tiap lokasi yang telah ditentukan guna mencegah penyebaran virus. Lalu juga mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan melakukan olahraga teratur serta berjemur di pagi hari. Selain itu, pada daya tarik wisata dan di beberapa *homestay* disediakan fasilitas cuci tangan beserta dengan sabun untuk meningkatkan kebersihan. Adapun langkah tersebut berhasil melihat kasus terakhir adalah pada 21 November 2020 dan hingga saat ini belum muncul kasus baru COVID-19 di Desa Melung.

Masyarakat pun turut dilibatkan dalam pembangunan pariwisata di Desa Melung sampai menjadi sebuah desa wisata melalui pembuatan dan perbaikan jalan, khususnya yang akan menjadi jalan utama guna mempermudah mobilitas wisatawan selama berada di desa.

Kemudian peneliti melakukan analisis *Tourism Area Life Cycle* (TALC) terhadap data temuan di atas. Diketahui bahwa Desa Melung berada pada tahapan *involvement* dengan ciri-ciri antara lain mulai disediakan fasilitas pariwisata berupa lahan parkir untuk daya tarik wisata Pagubugan dan *Greenhouse* Igir Mbawang, serta sudah disediakan warung makan, lahan kemah, dan *homestay*. Kemudian masyarakat mulai terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan wisatawan yang dapat dilihat pada keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan lokal, yaitu Calung dan Tari Lengger Banyumasan dengan mengikuti pelatihan tiap minggunya di Balai Desa Melung. Kebudayaan tersebut mulai dipertontonkan kepada para wisatawan yang berkunjung dan wisatawan juga diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan bersama masyarakat. Lalu didirikan produksi souvenir berupa kopi, yaitu Kopilung dan Kopi Meletup, serta anyaman bambu berupa gerabah bambu yang ide penjualan berasal dari masyarakat sendiri. Serta mulai ada promosi berskala kecil melalui media sosial *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Youtube*, dan *Website* dan memanfaatkan relasi melalui grup *Whatsapp*.

Selain itu, dilakukan analisis *stakeholder*, yang menghasilkan informasi bahwa terdapat lima kelompok pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata di Desa Melung yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, kelompok masyarakat, dan media. Berdasarkan gambar di bawah ini, terdapat tiga pemangku kepentingan yang berperan dominan pada pengembangan Desa Wisata Melung antara lain Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (11), Pemerintah Desa (16), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (17).



Gambar 2. Matriks *Stakeholder* Desa Melung
Sumber: Olahan Data Primer oleh Tim Peneliti, 2021

Pada gambar di atas, baik masyarakat (19) dan Pokdarwis (18) berada di posisi *subjects*, artinya kedua *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mendukung kegiatan tetapi kapasitas terhadap dampak mungkin tidak ada. Dalam jalannya pariwisata, masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai *stakeholder* primer juga sebagai pelaksana jalannya desa sebagai sebuah desa wisata. Adapun peran atau tugas yang telah dilakukan masyarakat seperti:

1. Secara sukarela mengajukan rumahnya sebagai *homestay* yang kemudian difasilitasi oleh BUMDes untuk akomodasi wisatawan ketika mengunjungi Desa Melung.
2. Menggagas ide terkait produksi suvenir berupa kopi, yaitu Kopilung dan Kopi Meletup, serta anyaman bambu berupa gerabah bambu.

Sedangkan Pokdarwis sendiri sebagai badan yang menggali dan mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal seharusnya memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya pariwisata. Namun, karena posisinya yang berada di bawah BUMDes membuat Pokdarwis tidak memiliki kekuasaan secara penuh dalam mengelola desa sebagai sebuah desa wisata sehingga kurang dapat menjalankan tugas secara maksimal dan terbatas pada kebijakan yang telah dibuat, yaitu berkaitan dengan penggalian dan pemberian motivasi pariwisata kepada warga lokal. Adapun beberapa tugas atau peran dari Pokdarwis yang telah dijalankan sejauh ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali mendorong, melihat kemungkinan-kemungkinan potensi yang bisa dikembangkan untuk disampaikan kepada BUMDes, andil memberikan masukan seperti di Pagubugan dalam merancang konsep, pelayanan kepada pengunjung, dan juga memberi ide terkait *homestay* dan standarnya.
2. Sebagai relawan membantu menjalankan pariwisata bersama BUMDes.
3. Melibatkan beberapa kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Ormas dalam programnya.
4. Menjalankan Program Kerja Pokdarwis yang telah dirancang.
5. Menyampaikan kegiatan tentang sapta pesona dan mendorong masyarakat untuk memahami pariwisata.

Dari hasil temuan di atas, sebagai desa wisata dengan klasifikasi berkembang, Desa Wisata Melung sudah memenuhi kriteria dalam Buku Pedoman Desa Wisata yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf dan Kemenko Marves (2021), antara lain sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan luar daerah, sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi dari kegiatan pariwisata.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sidiq dan Resnawaty (2017) di Desa Wisata Linggarjati, meskipun pemerintah Desa Melung mendominasi kegiatan pariwisata melalui BUMDes, pengembangan tidak terlalu difokuskan pada keuntungan (*profit*) yang didapat. Pemberdayaan masyarakat juga tetap berusaha dioptimalkan agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat. Meskipun sebagian masyarakat sempat merasa keberatan mengenai pembangunan desa wisata, mulai ada peningkatan sedikit demi sedikit pada keaktifan warga Desa Melung guna mendukung jalannya pariwisata. Akan tetapi, sama halnya seperti pada penelitian milik Saputra (2020) di Desa Wisata Catur, hingga saat ini tingkat keterlibatan masyarakat pada program desa wisata di Desa Melung secara langsung hanya sekitar 50% dari keseluruhan masyarakat di Desa Melung. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya pemahaman terkait

pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh dari adanya program desa wisata juga belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Desa Melung.

Adapun menurut Hilman dan Aziz (2019) masyarakat lokal seharusnya bersifat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap potensi objek wisata yang dimilikinya. Dalam penelitiannya di Desa Wisata Watu Rumpuk, masyarakat menginisiasi pembentukan desa wisata sebagai alternatif pemecahan dari musibah pertanian cengkeh yang terkena virus sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Berbeda dengan Desa Wisata Melung, ide pembentukan desa wisata sendiri bukan berasal dari masyarakat. Mulanya, sebagian masyarakat menolak pembentukan desa wisata tetapi seiring berkembangnya pariwisata di desanya, serta adanya sosialisasi dari pemerintah desa, masyarakat mulai tertarik untuk terlibat. Pada Desa Wisata Watu Rumpuk, Pemerintah Desa memasukkan program desa wisata ke dalam BUMDes dan membuat surat keterangan pembentukan Pokdarwis. Walaupun tidak semua masyarakat tergabung dalam Pokdarwis, tetapi ide dan gagasan wisata di Desa Wisata Watu Rumpuk muncul dari pemikiran masyarakat yang direalisasikan oleh Pokdarwis. Sama halnya dengan Pemerintah Desa Melung juga memasukkan program desa wisata ke dalam BUMDes dan pengelolaan sebagian besar dilakukan oleh BUMDes, tetapi Pokdarwis dibentuk sebagai salah satu syarat dari kelembagaan dalam desa wisata. Walaupun posisi Pokdarwis di Desa Wisata Melung tidak memiliki pengaruh yang kuat pada pengelolaan desa wisata, Pokdarwis sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dari Pokdarwis itu sendiri yaitu mendorong dan melibatkan masyarakat dalam menerapkan sapta pesona dan menggali potensi wisata yang ada di Desa Wisata Melung. Masyarakat lokal juga sudah terlibat hanya saja sebagai pelaksana dari program yang telah dibuat.

E. SIMPULAN

Simpulan

Hasil temuan menunjukkan bahwa produk wisata yang dimiliki dapat mendukung desa menjadi sebuah desa wisata. Namun perlu lebih diperhatikan terkait faktor keamanan guna menjamin wisatawan tetap aman selama berada di desa wisata. Meskipun memiliki potensi yang besar, masih terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata. Pengelolaan desa wisata yang menggunakan model *top down* membuat warga kurang inisiatif untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki dan cenderung hanya mengikuti arahan dari atas, padahal masyarakat merupakan *stakeholder* paling penting dalam melaksanakan dan menjalankan sebuah desa wisata. Pokdarwis sebagai *stakeholder* yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat tentu memiliki peran dan fungsi yang penting bagi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan Pokdarwis agar sesuai dengan perannya sebagai penggerak pariwisata berdasarkan pada hasil analisis *stakeholder* yang dilakukan sebelumnya guna mengajak warga lokal untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki.

Saran

Beberapa saran untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan desa wisata yang dapat tim peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan agrowisata melihat mata pencaharian utama masyarakat Desa Melung pada bidang pertanian sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu atraksi wisata di mana wisatawan dapat berbaur dengan masyarakat lokal dan belajar mengenai proses pengolahan tanaman.

2. Pengadaan sanggar seni guna mengajak warga maupun wisatawan untuk berpartisipasi dalam memelihara budaya yang dimiliki Desa Melung, seperti Tari Lengger dan Calung Banyumasan. Selain menyajikan pertunjukan, di sanggar ini juga wisatawan dapat belajar bersama dengan komunitas tari Desa Melung.
3. Pembuatan tempat khusus untuk produksi kopi dan penjualan *souvenir* di daerah strategis yang mudah dilalui wisatawan di mana pengunjung dapat menyaksikan dan mengikuti secara langsung proses pembuatan kopi dan anyaman. Kopi yang telah dibuat juga dapat langsung dinikmati di tempat yang disediakan sembari melihat pemandangan persawahan hijau khas Melung dan aktivitas petani. Pembuatan tempat ini dapat turut membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola produk oleh-oleh.
4. Perancangan paket wisata, baik yang berfokus pada potensi lokal dari Desa Melung sendiri seperti paket wisata tematik alam dan edukasi serta paket wisata *live in*, maupun melakukan kolaborasi paket wisata dengan desa terdekat seperti Desa Kemutug Lor guna mengatasi kurangnya daya tarik wisata sehingga dapat menambah pilihan wisata bagi para wisatawan dan juga dapat mempererat masyarakat antar desa untuk bersama-sama membangun pariwisata.
5. Peningkatan pelayanan agar menjadi lebih berkualitas dan dapat menjamin kenyamanan wisatawan selama berada di Desa Melung. Dapat dilakukan pelatihan dan pembinaan yang berhubungan dengan pengelolaan SDM seperti pelatihan *tour guide* lokal dan pelatihan pemanfaatan teknologi serta pembinaan terkait kesiapan mitigasi bencana alam dan pertolongan pertama pada kecelakaan di area wisata.

DAFTAR REFERENSI

- Bramwell, B. (2004). Mass tourism, diversification and sustainability in Southern Europe's coastal regions. *Coastal mass tourism: Diversification and sustainable development in Southern Europe*, 1-31.
- Butler, R. (2006). *The Tourism Area Life Cycle*. United Kingdom: Channel View Publications.
- Desa Melung. (2020). *Peraturan Desa Melung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Melung Tahun Anggaran 2021*. Lampiran Pemerintah Desa Melung: Banyumas
- Desa Melung. (2021). *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Tahun Anggaran 2021*. Banyumas
- Dewi, M. H., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. *Jurnal Kawistara*, 129-139.
- Farmaki, A. (2012). A supply-side evaluation of coastal tourism diversification: the case of Cyprus. *Tourism Planning & Development*, 9(2), 183-203.
- Gautama, B., Yuliawati, A., & Nurhayati, N. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- Hamzah, A., & Khalifah, Z. (2009). *Handbook on Community Based Tourism: "how to Develop and Sustain CBT"*. Singapore: APEC Secretariat.
- Hilman, Y. A., & Aziz, M. S. A. (2019). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata "Watu Rumpuk" Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 3(2), 54-66. <https://journal.stp-bandung.ac.id/index.php/jk/article/view/7>

- Kabupaten Banyumas. (2020). SK Bupti Banyumas Nomor/556/167/TAHUN2020 Tentang Penetapan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sebagai Desa Wisata. Banyumas
- Kasim, A., Bungin, B., Dzakiria, H., & Mokhtar, M. F. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata dan Hospitaliti*. Jakarta: KENCANA.
- Kemendikparekraf. (2019). *Pengembangan Wisata Perdesaan & Wisata Perkotaan: Rancangan Pola Perjalanan Gelang Projo (Magelang, Kulon Progo, Puworejo), Belitung Timur, Malag Raya*. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1992). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Morris, J., & Baddache, F. (2012). Back to basics: How to make *stakeholder* engagement meaningful for your company. *The Business of a Better World*.
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The Penta Helix collaboration model in developing centers of flagship industry in Bandung city. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412-417.
- Muliawan, H. (2008). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep*.
- Naibaho, E. R. (2011). *Diversifikasi Produk Wisata di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Palimbunga, I. P. (2018). *Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Tabalansu, Papua*. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5, 193.
- Pemerintah Desa Melung. (2019). Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDesa Tahun 2019 – 2025. Banyumas
- Pemerintah Desa Melung. (2019). Program Kerja Pengembangan Wisata Pokdarwis “Pagubugan”. Banyumas
- Rahim Firmansyah. (2012) *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of *stakeholder* analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*, 90(5), 1933-1949.
- Saputra, I. G. G. (2020). Studi Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Pengemasan Produk Desa Wisata Catur Kintamani Bali. *Jurnal Kepariwisata*, 19(1), 19-28.
- Scholes, K., Johnson, G., & Whittington, R. (2002). *Exploring corporate strategy*. Financial Times Prentice Hall.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 38-44.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tjiptono. (2001). *Manajemen Pemasaran dan Analisa Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFE.